

# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 2025



**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SIKKA  
JL. LITBANG-WAIRKLAU KELURAHAN  
KOTA UNENG  
TELP/FAX. 0382-2426109  
MAUMERE  
2025**



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat pasal 17 ayat (1), LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka sebagai salah satu organisasi perangkat daerah otonom yang melaksanakan kewenangan di bidang perikanan di Kabupaten Sikka melakukan pertanggung jawaban atas semua program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

LKPJ ini merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perubahannya selama kurun waktu satu tahun.

LKPJ Dinas Perikanan Kabupaten Sikka tahun 2025 berisi penjelasan umum organisasi yaitu visi, misi, strategi dan arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan pilihan dengan penekanan kepada program dan kegiatan, sasaran program/kegiatan, realisasi program dan kegiatan, capaian pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) dan permasalahan dan solusi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Harapan kami laporan ini bermanfaat dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan bidang perikanan pada masa yang akan datang.

Maumere, 22 Januari 2026

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Sikka, *z*



**PAULUS H. BANGKUR, S.Pi., M.Pi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660628 199703 1 005



# DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Data Umum Perangkat Daerah .....	4
<b>BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b> .....	<b>9</b>
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	9
2.2. Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	16
2.3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan .....	20
2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024 .....	20
2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	22
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b> .....	<b>23</b>
3.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan .....	23
3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya penyelesaian .....	23



---

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
4.1.	Kesimpulan .....	24
4.2.	Saran .....	25



## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Keadaan Sumber Daya Pegawai Per Bidang .....	6
1.2. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan .....	6
1.3. Keadaan Pegawai Menurut Jabatan .....	7
1.4. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	7
1.5. Keadaan Pegawai Menurut Golongan .....	8
.2.1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....	10
2.2. Data Produksi Perikanan Kabupaten Sikka .....	17
2.3. Rumah Tangga Perikanan (RTP).....	17
2.4. Jenis Alat Tangkap di Kabupaten Sikka.....	18
2.5. Armada Perikanan di Kabupaten Sikka.....	18
2.6. Data Konsumsi Ikan .....	19
2.7. Data Pendapatan Nelayan .....	19
2.8. Nilai PDRB .....	19
2.9. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD .....	20
2.10. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	22



---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat pasal 17 ayat (1), LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah otonom yang melaksanakan kewenangan di bidang perikanan di Kabupaten Sikka melakukan pertanggung jawaban atas semua program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD (APBD Induk maupun APBD Perubahan) untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat nelayan, pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan.

Dalam penyusunan LKPJ ini memuat tentang pencapaian hasil dari tujuan, sasaran dan indikator pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan 2025 - 2029 dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan pilihan dengan penekanan kepada program dan kegiatan, sasaran program/kegiatan, realisasi program dan kegiatan, capaian pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) dan permasalahan dan solusi.



## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan



17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026;
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025;

### **1.3. Data Umum Perangkat Daerah**

#### **1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi**

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka nomor Peraturan Bupati Sikka nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Susunan Organisasi

(1) Dinas Perikanan merupakan Tipe B yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perikanan Tangkap
- d. Bidang Pembinaan Mutu dan Perizinan
- e. Bidang Perikanan Budidaya
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bidang Perikanan Tangkap membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Bidang Pembinaan Mutu dan Perizinan membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

(5) Bidang Perikanan Budidaya membawahi:



a. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Tugas

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

d. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja dinas
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pembinaan mutu dan perizinan serta kelompok fungsional
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pembinaan mutu dan perizinan dan kelompok fungsional.
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

e. Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

## 2. Sumberdaya Manusia Aparatur

Penggunaan sumberdaya yang diibatkan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan tahun 2025 terdiri dari sumberdaya manusia perikanan yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional dan sumberdaya manusia yang melekat dengan tugas pokok dan fungsi yaitu sekretriati, bidang-bidang teknis dan seksi-seksi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.



Perinciannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Keadaan Sumber Daya Pegawai Per Bidang

No	BAGIAN	JUMLAH PNS	PPPK
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretariat	11	12
3	Bidang Perikanan Budidaya	5	7
4	Bidang Perikanan Tangkap	6	4
5	Bidang Pembinaan Mutu & Perijinan	5	17
	JUMLAH	28	40

Dari jumlah pegawai yang ada, dikelompokan sebagai berikut :

1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	1	1,47
3.	S.1	25	36,76
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	1	1,47
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	39	57,35
9.	SLTP	2	2,94
10.	SD	-	-
	Jumlah	<b>68</b>	<b>100</b>



## 2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Esselon II, III dan IV sebanyak 6 (enam) orang. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan / Eselon	Golongan				Jumlah	Ket
		I	II	III	IV		
1.	Struktural :						
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	-	-	-	1	<b>1</b>	
	- Eselon III	-	-	-	4	<b>4</b>	
	- Eselon IV	-	-	1	-	<b>1</b>	
2.	JFT	-	-	11	-	<b>11</b>	
3.	Staf	-	-	11	-	<b>11</b>	
4.	PPPK	2	38	-	-	<b>40</b>	
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	

## 3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 68 orang yaitu 48 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	48	70,59
2.	Perempuan	20	29,41
Jumlah		<b>68</b>	<b>100</b>



4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sikka ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 1.5. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	2	2,94
2.	Golongan II	38	55,88
3.	Golongan III	23	33,82
4.	Golongan IV	5	7,35
Jumlah		<b>68</b>	<b>100,00</b>



## **BAB II**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Target pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan capaian realisasi Rp. 1.392.538.292 atau 46,42%. Sedangkan alokasi anggaran belanja untuk Dinas Perikanan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 14.545.504.879,40 dengan realisasi mencapai Rp. 13.314.473.067 atau mencapai 91,54% dengan perincian :

##### **1. Belanja Operasi**

Alokasi anggaran belanja operasi tahun anggaran 2025 sebesar sebesar Rp. 14.509.145.779 dengan realisasi mencapai Rp. 13.271.839.723 atau mencapai 91,47% dengan perincian :

##### ➤ **Belanja pegawai**

Alokasi anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.689.322.378 dengan realisasi mencapai Rp. 2.315.556.505, atau mencapai 86,10%

##### ➤ **Belanja barang dan jasa**

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 11.819.823.401 dengan realisasi mencapai Rp. 10.956.283.218 atau mencapai 92,69%



## 2. Belanja Modal

Anggaran belanja modal dinas perikanan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 36.359.100 dengan realisasi sebesar Rp. 27.505.800, atau mencapai 75,65%

program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 sebanyak 4 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan rincian capaian belanja langsung dari masing-masing program, kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.772.487.279	4.086.481.740	85,63
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.394.700	22.118.900	98,77
a.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.394.700	22.118.900	98,77
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.774.456.378	2.400.594.505	86,52
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.684.522,378	2.310.756.505	86,08
b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	89.934.000	89.838.000	99,89
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.678.800	89.774.000	96,87
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.543.800	15.188.100	91,81
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	100
c.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.135.000	65.585.900	97,69
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.811.839.101	1.538.233.411	84,90
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.035.990.257	832.117.499	80,32
b.	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.906.000	1.906.000	100
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	773.942.844	704.209.912	90,99



5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		71.118.300	35.760.924	50,28
	a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga	67.934.800	35.027.924	51,56
	b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.183.500	733.000	23,02
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		9.045.939.500	8.955.320.327	99,00
1.	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota		9.045.939.500	8.955.320.327	99,00
	a.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	9.045.939.500	8.955.320.327	99,00
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		0	0	0
1.	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		0	0	0
	a.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	0	0	0
IV	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		727.078.100	272.671.000	37,50
1.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		727.078.100	272.671.000	37,50
	a.	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	727.078.100	272.671.000	37,50
TOTAL			14.545.504879,40	13.314.473.067	91,54

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.772.487.279 terealisasi sebesar Rp. 4.086.481.740 dengan tingkat pencapaian 85,63%

- a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.22.394.700 terealisasi sebesar Rp. 22.118.900 dengan tingkat pencapaian 98,77%



- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  
sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 22.394.700 terealisasi sebesar Rp. 22.118.900 dengan tingkat pencapaian 98,77%. Hasil yang dicapai Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan.
- b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah  
kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.2.774.456.378 terealisasi sebesar Rp. 2.400.594.505 dengan tingkat pencapaian 86,52%
- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN  
sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.684.522378 terealisasi sebesar Rp. 2.310.756.505 dengan tingkat pencapaian 86,08%. Hasil yang dicapai berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Perikanan selama 12 bulan.
- Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD  
sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 89.934.000 terealisasi sebesar Rp. 89.838.000 dengan tingkat pencapaian 98,91%. Hasil yang dicapai berupa pembayaran honorarium pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan dan lembur.



- c. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah  
kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 92.678.800 terealisasi sebesar Rp. 89.774.000 dengan tingkat pencapaian 96,87%
- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.543.800 terealisasi sebesar Rp. 15.188.100 dengan tingkat pencapaian 91,81%. Capaian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan alat tulis kantor dinas perikanan selama 12 bulan.
  - Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.000.000 terealisasi sebesar Rp. 9.000.000 dengan tingkat pencapaian 100%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa cetak dan penggandaan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dinas perikanan.
  - Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  
sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 67.135.000 terealisasi sebesar Rp. 65.585.900 dengan tingkat pencapaian 97,69%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa perjalanan dinas luar dan daerah dalam rangka pembinaan, koordinasi dan monitoring kegiatan perikanan.
- d. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  
kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.811.839.101 terealisasi sebesar Rp. 1.538.233.411 dengan tingkat pencapaian 84,90%



- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.035.990.257 terealisasi sebesar Rp. 832.117.499 dengan tingkat pencapaian 80,32%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran rekening air, pembelian token listrik kantor dan pembayaran internet/Wi-Fi dinas perikanan.
  - Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  
Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor alokasi dana Rp. 1.906.000 teralisasi sebesar Rp.1.906.000 dengan tingkat pencapaian 100%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan alat dan barang kebersihan kantor.
  - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor  
sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 773.942.844 terealisasi sebesar Rp. 704.209.912 dengan tingkat pencapaian 90,99%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran honorarium tenaga honorer dan pengadaan laptop serta printer.
- e. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  
kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.71.118.300 terealisasi sebesar Rp.35.760.924 dengan tingkat pencapaian 50,28%
- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan  
Alokasi dana sebesar Rp. 67.934.800 terealisasi sebesar Rp. 35.027.924 dengan tingkat pencapaian 51,56%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa



belanja bahan bakar kendaraan dinas operasional, belanja suku cadang kendaraan dan belanja pajak kendaraan.

- Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  
sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.183.500 terealisasi sebesar Rp. 733.000 dengan tingkat pencapaian 23,02%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan alat kantor berupa pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer/laptop dan pemeliharaan printer.

## 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

program pengelolaan perikanan tangkap dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.045.939.500 terealisasi sebesar Rp. 8.955.320.327 dengan tingkat pencapaian 99%

### a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.045.939.500 terealisasi sebesar Rp. 8.955.320.327 dengan tingkat pencapaian 99%.

- Sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil  
sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.045.939.500 terealisasi sebesar Rp. 8.955.320.327 dengan tingkat pencapaian 99%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap berupa pembangunan kapal perikanan, pengadaan mesin kapal, pengadaan alat tangkap

## 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya melalui kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil di tahun 2025 tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran



#### 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp. 727.078.100 terealisasi sebesar Rp. 272.671.000 dengan tingkat pencapaian 37,50%

a. kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kab/kota

kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kab/kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 727.078.100 terealisasi sebesar Rp. 272.671.000 dengan tingkat pencapaian 37,50%

- Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 727.078.100 terealisasi sebesar Rp. 272.671.000 dengan tingkat pencapaian 37,50% Kegiatan yang dilaksanakan berupa biaya operasional kegiatan 3 pabrik es yakni pabrik es di TPI Alok, pabrik es di Nangahale dan pabrik es di Nangahure.

## 2.2. Pelaksanaan Urusan Piihan

Dinas Perikanan sesuai dengan aturan melaksanakan urusan pilihan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya tugas pokoknya Dinas Perikanan melakukan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Gambaran umum kondisi perikanan Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### 1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Sikka sangat tergantung kepada semua aktivitas nelayan yang didukung dengan program-program pemerintah



maupun investasi sektor perikanan di Kabupaten Sikka. Perkembangan data produksi perikanan dapat ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Data Produksi perikanan Kabupaten Sikka :

No	Tahun	Produksi Penangkapan (Ton)	
		Target	Realisasi
1.	2021	21.083,18	21.450,31
2.	2022	22.137,33	25.514,09
3.	2023	23.244,20	23.970,48
4.	2024	26.151,54	27.625,41
5.	2025	29.973,6	28.998,56

## 2. Rumah Tangga Perikanan

Rumah Tangga Perikanan (RTP) perikanan terdiri dari rumah tangga perikanan tangkap dan rumah tangga perikanan budidaya.

### a. RTP Nelayan :

Rumah tangga perikanan tangkap sampai tahun 2025 masih mengacu dari hasil registrasi nelayan tahun 2015, dapat ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Rumah Tangga Perikanan (RTP) Kabupaten Sikka  
Tahun 2025

No	Status Nelayan	2024
1	Nelayan penuh	1.985
2	Nelayan Sambilan Utama	892
3	Nelayan Sambilan Tambahan	406
4	Buruh Nelayan	1.802
	<b>Jumlah</b>	<b>5.085</b>



b. Pembudidaya Ikan

Di tahun anggaran 2025 tidak ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan budidaya karena adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan pembinaan kelompok.

3. Alat Tangkap

Tabel 2.4. Jenis alat tangkap di Kabupaten Sikka

No	Jenis Alat Tangkap	Unit	
		2024	2025
1	Pukat Pantai	644	638
2	Pukat Cincin /Purse seine	206	203
3	Jaring Insang Tetap	466	461
4	Jaring Insang Hanyut	991	981
5	Bagan	174	172
6	Longline	3	3
7	Rawai Dasar	92	83
8	Huhate / Pole and line	75	67
9	Pancing / Hand line	9.423	9.329
10	Bubu	179	16
11	Panah	913	40
12	Jala Tebar	215	130

4. Armada Perikanan

Tabel 2.5. Armada perikanan di Kabupaten Sikka

NO	Armada Perikanan	2024 (unit)	2025 (unit)
1	Jukung	50	50
2	Perahu Papan Kecil/sampan fiberglass<5m	332	373
3	Perahu Papan Sedang/sampan fiberglass >5m	255	305
4	Perahu Papan Besar	0	0
5	Motor Tempel < 5 GT	157	186
6	Motor Tempel 5-10 GT	0	0
7	Motor Tempel 10-20 GT	0	0
8	Kapal Motor < 5 GT	513	534



9	Kapal Motor 5-10 GT	102	102
10	Kapal Motor 10-20 GT	8	10
11	Kapal Motor 20-30 GT	67	67
12	Kapal Motor 30-50 GT	1	1

## 5. Konsumsi ikan

Tabel 2.6. Data konsumsi ikan penduduk Kabupaten Sikka

No	Tahun	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	
		Target	Capaian
1.	2021	54,75	62,54
2.	2022	55,25	74,74
3.	2023	56,25	70,15
4.	2024	76,61	79,57
5.	2025	84,75	79,83

## 6. Pendapatan Nelayan

Tabel 2.7. Data Pendapatan Nelayan Kabupaten Sikka

No.	Tahun	Pendapatan Nelayan (Rp.)	
		Target	Capaian
1.	2021	14.750.000	14.775.744
2.	2022	15.500.000	19.083.980
3.	2023	16.250.000	14.157.940
4.	2024	19.561.082	20.138.456
5.	2025	20.050.109	20.655.606

## 8. Nilai PDRB

Tabel 2.8. Nilai PDRB Tiga Tahun Terakhir

No.	Tahun	Nilai PDRB
1.	2023	10,31
2.	2024	11,31
3.	2025	11,16



### 2.3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang dilakukan Dinas Perikanan didasarkan pada Renstra Dinas Perikanan 2025-2029, antara lain :

1. Fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan nilai tambah produk perikanan serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan, pengembangan inovasi dan riset di bidang perikanan serta peningkatan nilai tambah produk perikanan.
3. Berfokus pada peningkatan produksi perikanan, diversifikasi produk olahan serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
4. Mendorong peningkatan daya saing produk perikanan melalui standarisasi mutu produk perikanan bernilai tambah, serta promosi produk perikanan lokal.
5. Pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola perikanan.

### 2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.9. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pemerintah perlu segera merencanakan dan menyiapkan alokasi, anggaran untuk Pembangunan kawasan ekonomi, perikanan di Bebung Kecamatan Alok Barat dan di Nangahale Kecamatan Talibura dalam suatu rantai bisnis perikanan	Pemerintah telah menyusun dokumen perencanaan untuk pembangunan kawasan ekonomi perikanan Bebung Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat dan Proposal Pembangunan	untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di bidang kelautan dan perikanan sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir secara umum dan kesejahteraan



		Kawasan Ekonomi Perikanan sudah diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	ekonomi nelayan secara khusus
2.	Pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi NIT untuk dapat membuka Kantor Cabang/Unit di Kabupaten Sikka guna mempercepat proses penerbitan ijin berlayar bagi para nelayan	Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dengan Surat Pj. Bupati Sikka Nomor : Diskan.523/40/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk bisa dilakukan langsung di Kabupaten Sikka	untuk mendekatkan pelayanan pengurusan izin berlayar bagi kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan
3.	Pemerintah perlu melakukan inovasi, pengembangan sektor perikanan di wilayah Selatan Kabupaten Sikka yang berpotensi, demi menunjang pendapatan daerah dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat	Pengembangan sektor perikanan di wilayah selatan menjadi perhatian pemerintah, dimana TA. 2026 dialokasikan anggaran untuk pembangunan pabrik es di wilayah Kecamatan Bola.	untuk pengembangan pembangunan sektor perikanan di wilayah selatan dan menunjang penambahan pendapatan asli daerah



## 2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Tabel 2.10.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Pertumbuhan sektor pertanian	%	3,25	3,25*	100%
2.	Indeks Ketahanan Pangan	%	77,72	61,80	79,52%
3.	Pertumbuhan Pendapatan Nelayan	%	2,25	2,57	114,22%
4.	Pertumbuhan Pendapatan pembudidaya ikan	%	0,20	0,17	85%
5.	Nilai SAKIP	Angka	92,51	92,01*	99,46%

Ket : (\*) Data Realisasi Tahun 2024 dari BPS kab. Sikka dan Inspektorat Kab. Sikka.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Tahun 20205 - 2029 yakni realisasi pertumbuhan sektor pertanian tahun 2025 sebesar 3,25% dari target sebesar 3,25 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Indeks ketahanan pangan tahun 2025 target sebesar 77,72% terealisasi 61,80% dengan capaian kinerja sebesar 79,52%. Pertumbuhan pendapatan nelayan tahun 2025 dari target 2,25% terealisasi 2,57% dengan capaian kinerja sebesar 114,22%. Pertumbuhan pendapatan pembudidaya ikan tahun 2025 dari target 0,20 terealisasi sebesar 0,17% dengan capaian kinerja sebesar 85%. Nilai SAKIP tahun 2025 target 92,51 terealisasi 92,01 dengan capaian 99,46%



## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

#### **3.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan**

Dinas Perikanan di Tahun 2025 mendapatkan Dana Insentif Daerah ( DID) atau DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan sebesar Rp. 2.499.930.000 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 2.489.394.800 atau 99,58%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat seperti pembangunan Kapal Fiberglass 1 GT, pembangunan Perahu Fiberglass 5,5 meter dilengkapi mesin dan alat tangkap, pembangunan Sampan Fiberglass 4 m, pengadaan pukot 1,5 inci lengkap, Pengadaan pukot 2,5 inci lengkap, Pengadaan pukot 2 inci lengkap, pengadaan Bahan pembuatan perahu fiberglass, pengadaan Cool Box 220 liter, pengadaan Cool Box 300 Liter, pengadaan Genset kapal, pengadaan Mesin Jiandong 35 PK dan Waring Bagan Lengkap.

#### **3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana insentif Daerah atau DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan mengalami hambatan yakni keterlambatan penyaluran dana pada awal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan komunikasi dengan pihak yang berkontrak untuk tetap melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati sehingga ketika dana disalurkan langsung dapat dibayarkan.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Target pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan capaian realisasi Rp. 1.392.538.292 atau 46,42%.
2. alokasi anggaran belanja untuk Dinas Perikanan tahun anggaran 2025 sebesar Rp.14.545.504.879,40 dengan realisasi mencapai Rp. 13.314.473.067 atau mencapai 91,54%
3. Alokasi anggaran belanja operasi tahun anggaran 2025 sebesar sebesar Rp.14.509.145.779 dengan realisasi mencapai Rp. 13.271.839.723 atau mencapai 91,47%
4. Anggaran belanja modal dinas perikanan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 36.359.100 dengan realisasi sebesar Rp. 27.505.800, atau mencapai 75,65%
5. Alokasi anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.689.322.378 dengan realisasi mencapai Rp. 2.315.556.505, atau mencapai 86,10%
6. Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 11.819.823.401 dengan realisasi mencapai Rp. 10.956.283.218 atau mencapai 92,69%
7. pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,25% dari target sebesar 3,25 dengan capaian kinerja sebesar 100 %.
8. Indeks ketahanan pangan target sebesar 77,72% terealisasi 61,80% dengan capaian kinerja sebesar 79,52%.




9. Pertumbuhan pendapatan nelayan dari target 2,25% terealisasi 2,57% dengan capaian Kinerja sebesar 114,22%.
10. Pertumbuhan pendapatan pembudidaya ikan dari target 0,20 terealisasi sebesar 0,17% dengan capaian Kinerja sebesar 85%.
11. Nilai SAKIP terealisasi 92,01 dari target 92,51 dengan tingkat capaian 99,46%.


#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan adalah :

1. Penyerapan anggaran yang belum maksimal pada belanja barang dan jasa perlu ditingkatkan.
2. Program yang berkaitan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya ikan dan pemasaran hasil perikanan perlu ditingkatkan pagu anggarannya.
3. Perlu peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di sektor perikanan terutama untuk pelatihan teknis penangkapan, pengolahan dan budidaya ikan.

Maumere, 22 Januari 2026

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Sikka, 

  
Paulus Hilarius Bangkur, S.Pi, M.Pi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560628 199703 1 005